



PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

**REVITALISASI PERAN PENYULUH PERTANIAN
INDONESIA**

BIDANG KEGIATAN:
PKM GAGASAN TERTULIS (PKM-GT)

Diusulkan oleh:

Ketua Kelompok	: Firza Maudi	(H34060227 / t.a. 2006)
Anggota Kelompok	: Syura Awathif Ahmad A. W.	(H34063101 / t.a. 2006)
	Fithriani Rahayu	(H34070080 / t.a. 2007)

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2009**

DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK

1. Ketua Pelaksana Kegiatan

- a. Nama Lengkap : Firza Maudi
- b. NRP : H34060227
- c. Fakultas / Departemen : Ekonomi dan Manajemen /Agribisnis

2. Anggota Pelaksana Kegiatan

- a. Nama Lengkap : Syura Awathif Ahmad A. W.
- b. NRP : H34063101
- c. Fakultas / Departemen : Ekonomi dan Manajemen /Agribisnis

- a. Nama Lengkap : Fithriani Rahayu S.M
- b. NRP : H34070080
- c. Fakultas / Departemen : Ekonomi dan Manajemen /Agribisnis

**LEMBAR PENGESAHAN
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA**

1. Judul Kegiatan : Revitalisasi Peran Penyuluh Pertanian Indonesia
2. Bidang Ilmu : PKM Gagasan Tertulis
3. Ketua Pelaksana Kegiatan
 - a. Nama Lengkap : Firza Maudi
 - b. NIM : H34060227
 - c. Departemen : Agribisnis
 - d. Universitas : Institut Pertanian Bogor

Menyetujui,
Ketua Departemen

Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS
NIP. 131 415 082

Wakil Rektor Bidang
Akademik dan Kemahasiswaan

Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, MS
NIP. 131 473 999

Bogor, 6 April 2009

Ketua Pelaksana Kegiatan

Firza Maudi
NIM. H3406227

Dosen Pendamping

Etriya, SP, MM
NIP. 132 311 854

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul **“Revitalisasi Peran Penyuluh Pertanian Indonesia”**. Karya tulis ini diajukan untuk mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa – Gagasan Tertulis (PKM-GT) tahun 2009.

Karya tulis ini mencoba memaparkan kondisi masa lalu penyuluh pertanian lapangan (PPL) di Indonesia dan juga masa kini, kemudian menjelaskan bagaimana peran dan fungsi dari penyuluh pertanian yang ideal. Serta dipaparkan mengenai alternatif solusi untuk menyukseskan program revitalisasi penyuluh di Indonesia. Karya tulis ini kami susun sebagai masukan bagi para penyuluh pertanian, pemerintah sebagai peregulasi, institusi pendidikan, dan juga pihak-pihak lain yang terkait dengan penyuluhan pertanian.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritik membangun sangat kami harapkan.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian karya tulis ini. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun bagi penyuluh pertanian di Indonesia.

Bogor, 6 April 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK	ii
LEMBAR PENGESAHAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
RINGKASAN	ix
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Perumusan Masalah	2
Tujuan	2
TELAAH PUSTAKA	3
METODE PENULISAN	5
ANALISIS DAN SINTESIS	6
Dinamika Penyelenggaraan Penyuluhan	6
Kondisi Penyuluh Pertanian Masa Kini	7
Penyuluh yang Ideal dan Paradigma Baru Penyuluhan	9
Alternatif Solusi Guna Mendukung Revitalisasi Penyuluhan	12
PENUTUP	15
Kesimpulan	15
Saran	15
DAFTAR PUSTAKA	16
LAMPIRAN	17

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Peta Kebutuhan Rekrutmen Tenaga Penyuluh Perikanan
2009 – 2013 18

DAFTAR GAMBAR

1. Grafik 1. Jumlah Penyuluh Pertanian, PBB, dan Ratio Penyuluhan
dengan Rumah Tangga Petani, Penyuluh/Kecamatan di Jawa Barat
Tahun 2005 17

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Data Pendukung	17
2. Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup	19

RINGKASAN

Potret sektor pertanian Indonesia menunjukkan tren kinerja yang menurun selama beberapa puluh tahun. Dalam menanggapi masalah ini, strategi pembangunan nasional perlu ditujukan untuk memperhatikan kembali salah satu bidang keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu sektor pertanian. Untuk itu, Kabinet Indonesia Bersatu menetapkan Revitalisasi Pertanian sebagai salah satu strategi utama pembangunan nasional 2005-2009, guna memajukan kembali pertanian Indonesia.

Program Revitalisasi Pertanian difokuskan pada penataan kelembagaan, peningkatan kuantitas dan kualitas pertanian, peningkatan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian, peningkatan kelembagaan dan kepemimpinan petani, pengembangan kerjasama antara sistem penyuluhan pertanian dan agribisnis, pembiayaan pertanian, dan diseminasi teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi pertanian di pedesaan. Dalam pelaksanaan usaha revitalisasi pertanian tersebut, peran dari penyuluh pertanian lapangan (PPL) sangat dibutuhkan dan menjadi salah satu komponen utama untuk mensukseskan program ini.

Keberadaan tenaga penyuluh dalam mendukung program revitalisasi pertanian Indonesia haruslah memperoleh perhatian yang sangat serius dari pemerintah dan seluruh pihak yang terkait. Sehingga berbagai upaya harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas penyuluh pertanian, demi mendukung tercapainya tujuan revitalisasi pertanian.

Pelaksanaan penyuluhan di Indonesia sendiri senantiasa mengalami gejolak dalam perkembangannya. Sejak awal peresmian pelaksanaannya pada tahun 1905, kegiatan penyuluhan pertanian di Indonesia senantiasa diposisikan sebagai instrumen untuk mensukseskan program-program pemerintah. Kegiatan penyuluhan efektif dilaksanakan dengan pendekatan pola pembangunan yang sentralistik, terbukti dengan tercapainya swasembada beras Indonesia tahun 1984, yang dianggap sebagai puncak prestasi penyuluhan pertanian Indonesia. Tahun 1984 hingga 1991, penyuluh pertanian dikelola Sekretariat Badan Pengendali BIMAS. Selama periode ini penyuluhan pertanian dipergunakan sebagai instrumen untuk memecahkan masalah kelangkaan pangan, khususnya beras. Namun, periode ini menunjukkan gejala krisis penyuluhan pertanian di Indonesia, yang terus berlanjut hingga saat ini, dan menunjukkan pengaruh signifikannya berupa penurunan kinerja pertanian Indonesia.

Program revitalisasi berupaya memperbaiki sistem dan kinerja penyuluhan pertanian yang sejak akhir 1990-an sangat menurun kondisinya. Salah satu tonggak pelaksanaan revitalisasi penyuluhan adalah Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) No. 16 Tahun 2006. Undang-undang ini menyebutkan perlunya penataan kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, dari tingkat pusat sampai dengan kecamatan dan menyediakan sumber dana yang merupakan kontribusi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang ini merupakan titik awal pemberdayaan petani melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan penyuluh pertanian PNS, swasta, dan penyuluh pertanian swadaya.

Sebagai tindak lanjut Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan Presiden pada Juli 2005, pada 3 Desember 2005 di Sumatera Selatan, Menteri Pertanian mencanangkan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian (RPP). Pada hakikatnya, Revitalisasi Penyuluhan Pertanian adalah upaya mendudukkan, memerankan, dan memfungsikan serta menata penyuluhan pertanian agar terwujud kesatuan pengertian, kesatuan korp, dan arah kebijakan.

Dalam pelaksanaannya, program perbaikan sistem penyuluhan pertanian masih mengalami berbagai kendala, diantaranya adalah: kekurangan jumlah tenaga penyuluh (PPL), persebaran PPL yang tidak merata, kualitas kinerja para penyuluh yang menurun akibat kebijakan otonomi daerah pemerintah yang dapat dikatakan kurang mendukung usaha pengembangan penyuluhan, ketidaksesuaian orientasi peran, fungsi, dan kerja penyuluh dengan yang diharapkan, serta kualitas SDM penyuluh yang kurang memadai.

Guna mengatasi berbagai kendala pelaksanaan revitalisasi penyuluhan, diperlukan kerja dan partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait, yaitu pemerintah, institusi pendidikan, beserta seluruh masyarakat, khususnya para pelaku pertanian sebagai objek dari pelaksanaan program ini secara terintegrasi. Sudah saatnya PPL pun mengubah paradigma penyuluhan itu sendiri.

Paradigma baru dari penyuluhan yang perlu dibangun adalah penyuluhan sebagai jasa informasi, penerapan sistem lokalitas, berorientasi agribisnis, pendekatan kelompok, fokus pada kepentingan petani, pendekatan humanistik-egaliter, profesionalisme penyuluhan, akuntabilitas, dan kemampuan untuk memuaskan petani dengan memenuhi berbagai kebutuhan mereka, terutama dalam bidang usaha pertanian yang mereka lakukan. Peran penting PPL adalah sebagai fasilitator untuk membangkitkan dan memunculkan kemampuan dan kepercayaan diri petani untuk menganalisa pilihan-pilihan yang ada serta konsekuensi dari setiap pilihan itu, dengan menumbuhkan rasa percaya diri petani untuk memecahkan persoalan mereka sendiri. Penyuluhan dengan para penyuluhnya merupakan penghubung yang bersifat dua arah (*two way traffic*), yakni menghubungkan: (1) pengetahuan yang dibutuhkan petani dan pengalaman yang biasa dilakukan oleh petani, (2) pengalaman baru yang terjadi pada pihak para ahli dan kondisi nyata petani.

Proses pelaksanaan revitalisasi penyuluhan perlu mengacu pada UU No. 16 tahun 2006, dengan memantapkan fungsi Badan Penyuluh Pusat dan Komisi Penyuluhan Nasional dalam menentukan kebijakan penyuluhan Indonesia. Kegiatan penyuluhan harus dilakukan terintegrasi antara badan pelaksana penyuluhan di berbagai tingkat wilayah, balai penyuluhan, dan pos penyuluhan di desa-desa yang merupakan suatu titik kegiatan penyuluh terdekat dengan objek penyuluh, yaitu petani.